



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PESERTA MANDIRI MEMBAYAR IURAN BPJS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUTALIMBARU

Siti Fanisa <sup>1)</sup>; Riska Fadilla Pasaribu <sup>2)</sup>; Fitriani Pramita Gurning <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> [sfanisa7@gmail.com](mailto:sfanisa7@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2)</sup> [riskapasaribu6451@gmail.com](mailto:riskapasaribu6451@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2)</sup> [FitrianiGurning@uinsu.ac.id](mailto:FitrianiGurning@uinsu.ac.id), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### Abstract

Health is a human right and is one of the elements of prosperity must be realized for the entire Indonesian nation. **Objective:** To identify factors that influence independent participants' compliance with paying BPJS contributions in the Kutalimbaru Health Center Work Area. **Method:** This research used a cross sectional design and the sample used was 100 people with the sampling technique using stratified random sampling technique. **Results:** Statistical tests show that there is a significant relationship between levels education ( $p=0.000$ ), level of satisfaction with BPJS health services ( $p=0.045$ ), level of difficulty ( $p=0.000$ ) and level of factors that hinder paying contributions ( $p=0.000$ ) with compliance of independent participants in paying BPJS contributions in the Kutalimbaru Health Center Working Area. **Conclusion:** There is no significant relationship between the level of fixed income and access to health facilities on the compliance of independent participants in paying BPJS contributions in the Kutalimbaru Health Center Work Area. BPJS Health is also expected to provide information to participants about how to use the BPJS Health program, payment procedures, participation, and sanctions given if they are in arrears in contributions.

**Keywords:** BPJS Health, Community Health Center, Compliance

### Abstrak

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi segenap bangsa Indonesia. **Tujuan:** Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional* dan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *stratified random sampling*. **Hasil:** Uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan ( $p=0,000$ ), tingkat kepuasan terhadap layanan BPJS kesehatan ( $p=0,045$ ), tingkat kesulitan ( $p=0,000$ ) dan tingkat faktor yang menghambat membayar iuran ( $p=0,000$ ) dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru. **Kesimpulan:** Tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat penghasilan tetap dan akses ke fasilitas kesehatan terhadap kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru. BPJS Kesehatan juga diharapkan memberikan informasi kepada peserta tentang cara menggunakan program BPJS Kesehatan, tata cara pembayaran, kepesertaan, dan sanksi yang diberikan apabila menunggak iuran.

**Kata Kunci:** BPJS Kesehatan, Kepatuhan, Puskesmas

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi segenap bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan sosial. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan (Wulandari *et al.*, 2020). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, menjelaskan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif, dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Nasution *et al.*, 2022). Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia tertuang pada Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang adanya



jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diberikan kepada peserta yang telah membayar iuran, baik secara pribadi maupun oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan program jaminan kesehatan termasuk puskesmas (Undang-Undang (UU) No. 24, 2011).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola oleh Badan Penyelenggara asuransi Kesehatan yang berbentuk Perseroan Terbatas, yakni PT. Askes. BPJS Kesehatan ini bersifat nirlaba, kegotongroyongan, portabilitas, serta memiliki tata kelola yang baik (*good governance*): keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisien dan efektif dibandingkan PT. Askes yang bersifat profit. Cakupan peserta BPJS Kesehatan pun berbeda dengan PT. Askes karena kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga cakupannya universal (*universal coverage*) (Thabrany, 2016). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan inisiatif untuk pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan iuran yang terjangkau dan cakupan pelayanan kesehatan yang luas. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah (Wulandari *et al.*, 2020).

Berdasarkan laporan dari BPJS Kesehatan pada tahun 2016, secara nasional jumlah masyarakat Indonesia yang telah menjadi Peserta Program JKN berjumlah 171.939.254 jiwa. Peserta ini terdiri dari beberapa jenis kepesertaan diantaranya peserta bukan penerima bantuan iuran dan peserta penerima bantuan iuran. Peserta mandiri merupakan jumlah peserta terbanyak kedua yaitu 11% setelah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN/ Jamkesmas sebanyak 52%. Peserta lain yaitu pegawai swasta sejumlah 9%, Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebanyak 8%, pegawai BUMD sebanyak 8%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6%, pensiunan sebanyak 3%, Tentara Negara Indonesia (TNI) sebanyak 1%, POLRI sebanyak 1%, dan pegawai BUMN sebanyak 1% (BPJS Kesehatan, 2016).

Kemampuan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan seseorang. Faktor penghasilan dan jumlah tanggungan dalam keluarga sangat mempengaruhi kemampuan membayar. Setiap orang berbeda-beda, ada yang memiliki kemampuan membayar iuran besar tetapi tidak ingin membayar pelayanan kesehatan, sehingga kemauan membayar lebih kecil dari kemampuan. Ada juga orang yang memiliki kemampuan membayar iuran rendah tetapi rutin membayar pelayanan kesehatan, sehingga kemauan membayar lebih besar dari kemampuan. Pengukuran tingkat kemampuan membayar dan kemauan membayar (ATP-WTP) sangat penting karena mempengaruhi masyarakat dalam mengikuti jaminan kesehatan. (Rusydi; Arni Rizqiani *et al.*, 2022).

Ability to pay dan willingness to pay memiliki pengaruh yang signifikan dalam penggunaan layanan kesehatan, yang kemudian juga mempengaruhi kesetaraan. Pendanaan kesehatan yang bijaksana dan merata melibatkan masyarakat yang dapat memperoleh layanan kesehatan sesuai kebutuhan kesehatan dan pembayaran biaya layanan kesehatan yang sesuai kemampuan membayar, walaupun telah dikenalkan biaya tarif yang dihitung. Dalam masalah tarif belum dapat dipastikan jika sifat kebutuhan yang belum pasti. Jika pasien harus membayar biaya tambahan, hal itu termasuk dalam pembayaran yang terpaksa. Ketidakmampuan masyarakat dalam membayar dapat mempengaruhi keterbatasan kemampuan atas layanan kesehatan yang diterima (Rusydi; Arni Rizqiani *et al.*, 2022).

Jaminan kesehatan semakin mendapat dukungan dan komitmen dari seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dalam hal mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerahnya menjadi bagian dari Program JKN-KIS. Salah satunya yaitu Kabupaten Deli Serdang, melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam tentang kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dengan penandatanganan kerjasama ini,



Pemerintah kabupaten Deli Serdang melanjutkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang telah dimulai sejak tahun 2016, dimana pada tahun 2020, sebanyak 124.714 jiwa penduduk Deli Serdang telah di cover kepesertaannya lewat program Jamkesda Deli Serdang yang terintegrasi dengan Program JKN-KIS. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah membuktikan dukungan dan komitmennya untuk mencapai UHC dengan mengintegrasikan program Jamkesda secara berkelanjutan. Hal ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memastikan setiap warga di daerahnya tidak perlu lagi khawatir dengan biaya pelayanan kesehatan yang tak jarang menjadi beban ekonomi keluarga bagi masyarakat Deli Serdang (Jamkesnews, 2019)

Namun masi banyak masyarakat Deli Serdang belum tercover dalam Jamkesda Deli Serdang yang masih membayar iuran secara mandiri. Banyak juga masyarakat yang merasa berat membayar iuran, tidak sedikit kasus masyarakat lupa membayar iuran BPJS Kesehatan, sehingga ketika dibutuhkan mengalami kesulitan. Wulandari (2020) menemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan peserta mandiri adalah pengetahuan, pendapatan, persepsi terhadap pelayanan kesehatan dan persepsi risiko. Sedangkan menurut Yunita (2021) faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan membayar BPJS mandiri yaitu pengetahuan. Penelitian lainnya dari Miftahul (2021) ditemukan bahwa kepatuhan membayar BPJS mandiri disebabkan oleh faktor pendapatan, persepsi pelayanan kesehatan, dan akses pembayaran.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran Program JKN dengan mengambil lokasi di wilayah kerja Puskesmas Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran BPJS kesehatan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta mandiri di wilayah kerja Puskesmas Kutalimbaru pada bulan Mei 2024. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *stratified random sampling*, artinya pemilihan sampel dengan terlebih dahulu populasi dibagi kedalam strata (tingkat kelas iuran). Dikarenakan Kabupaten Deli Serdang sudah memberlakukan Jamkesda, maka sampel yang diambil hanya kelas iuran 1 dan 2. Selanjutnya pada masing-masing tingkat kelas iuran menggunakan *simple random sampling*. Pengambilan sample peserta secara acak. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan, sedangkan variabel independen yaitu pengetahuan, pendapatan, dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan. Pengambilan informasi mengenai variabel dependen dan variabel independen dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah divalidasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data sebanyak 100 responden yaitu peserta BPJS Mandiri di Puskesmas Kutalimbaru yang diisi sendiri oleh responden tersebut menggunakan kuesioner dimana responden mengisi kuesioner yang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024-10 Mei 2024. Hasil penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	n	%
<b>Umur</b>		
<20 Tahun	4	4,0
20-30 Tahun	31	31,0
31-40 Tahun	18	18,0



41-50 Tahun	29	29,0
>51 Tahun	18	18,0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
<b>BPJS Kesehatan Kelas</b>		
Kelas I	40	40,0
Kelas II	60	60,0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
<b>Pendidikan</b>		
SD	15	15,0
SMP	22	22,0
SMA	40	40,0
PT	23	23,0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
<b>Penghasilan Tetap</b>		
Tidak	64	64,0
Ya	36	36,0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>

Tabel 1 karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 20-30 tahun yaitu 31 orang (31,0%). BPJS Kesehatan yang digunakan oleh responden sebagian besar adalah BPJS kelas II yaitu 60 orang (60,0%). Pendidikan terakhir yang paling banyak adalah tamat SMA dengan jumlah sebanyak 40 orang (40%). Sebagian besar responden tidak memiliki penghasilan tetap sebanyak 64 orang (64%)

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS Kesehatan dan Faktor yang Mempengaruhi

Variabel	n	%
<b>Pendidikan</b>		
SD	15	15,0
SMP	22	22,0
SMA	40	40,0
PT	23	23,0
<b>Penghasilan Tetap</b>		
Tidak	64	64,0
Ya	36	36,0
<b>Kepatuhan Pembayaran BPJS Kesehatan</b>		
Kurang Patuh	60	60,0
Patuh	40	40,0
<b>Kepuasan Layanan BPJS Kesehatan</b>		
Kurang Puas	30	30,0
Puas	70	70,0
<b>Pengetahuan</b>		
Rendah	65	65,0
Tinggi	35	35,0
<b>Memiliki Akses ke Fasilitas Kesehatan</b>		
Tidak	5	5,0
Ya	95	95,0
<b>Kesulitan Dalam Membayar Iuran</b>		
Tidak	38	38,0
Ya	62	62,0



Faktor yang Menghambat Membayar Iuran		
Ekonomi	41	41,0
Pengetahuan	5	5,0
Tidak Butuh	16	16,0
Tidak Ada	38	38,0

Tabel 2 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang paling banyak adalah tamat SMA dengan jumlah sebanyak 40 orang (40%). Sebagian besar responden tidak memiliki penghasilan tetap sebanyak 64 orang (64%). Kepatuhan pembayaran BPJS Kesehatan pada responden adalah kurang patuh yaitu 60 orang (60%), hasil ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh peserta mandiri rutin melakukan pembayaran iuran setiap bulannya. Responden dengan kepuasan terhadap layanan BPJS kesehatan yang paling banyak adalah puas dengan jumlah 70 orang (70%). Tingkat pengetahuan responden sebagian besar adalah rendah dengan jumlah 65 orang (65%). Sebagian besar responden memiliki akses ke fasilitas kesehatan adalah ya yaitu 95 orang (95%). Sebagian besar responden kesulitan dalam membayar iuran BPJS adalah ya yaitu 62 orang (62%). Faktor yang menghambat membayar iuran BPJS pada responden adalah ekonomi yaitu 41 orang (41%).

Tabel 3. Hubungan antara Pendidikan, Penghasilan Tetap, Kepuasan Layanan BPJS Kesehatan, Pengetahuan, Memiliki Akses ke Fasilitas Kesehatan, Kesulitan dalam Membayar Iuran, dan Faktor yang Menghambat Membayar Iuran dengan Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru Tahun 2024

Variabel	Kepatuhan				Jumlah		p.value
	Kurang Patuh		Patuh		n	%	
	n	%	n	%			
<b>Pendidikan</b>							
SD	13	86,7	2	13,3	15	100,0	0,000
SMP	18	81,8	4	18,2	22	100,0	
SMA	26	65,0	14	35,0	40	100,0	
PT	3	13,0	20	50,0	23	100,0	
<b>Penghasilan Tetap</b>							
Tidak	42	65,6	22	34,4	64	100,0	0,187
Ya	18	50,0	18	50,0	36	100,0	
<b>Kepuasan Terhadap Layanan BPJS Kesehatan</b>							
Kurang Puas	23	76,7	7	23,3	30	100,0	0,045
Puas	37	52,9	33	47,1	70	100,0	
<b>Akses ke Fasilitas Kesehatan</b>							
Tidak	4	80,0	1	20,0	5	100,0	0,645
Ya	56	58,9	39	41,1	95	100,0	
<b>Kesulitan Dalam Membayar Iuran</b>							
Tidak	11	28,9	27	71,1	38	100,0	0,000
Ya	49	79,0	13	21,0	62	100,0	
<b>Faktor yang Menghambat Membayar Iuran</b>							
Ekonomi	31	75,6	10	24,4	41	100,0	0,000



Pengetahuan	5	100,0	0	0,0	5	100,0
Tidak Butuh	13	81,2	3	18,8	16	100,0
Tidak Ada	11	28,9	27	71,1	38	100,0

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan, kepuasan terhadap layanan BPJS Kesehatan, pengetahuan, kesulitan dalam membayar membayar iuran, dan faktor yang menghambat membayar iuran. Persentase tingkat kepatuhan lebih tinggi pada responden dengan tingkat pendidikan terakhir perguruan tinggi. Hasil uji chi square didapatkan nilai  $p=0,000$  ( $p<0,05$ ) artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan.

Persentase tingkat kepatuhan lebih tinggi pada responden dengan tingkat kepuasan terhadap layanan BPJS Kesehatan Puas dibanding dengan responden dengan tingkat kepuasan terhadap layanan BPJS Kesehatan tidak puas. Hasil uji chi square didapatkan nilai  $p=0,045$  ( $p<0,05$ ) artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepuasan terhadap layanan BPJS Kesehatan dengan kepatuhan.

Persentase tingkat kepatuhan sama tinggi pada responden dengan tingkat pengetahuan rendah dan tinggi. Hasil uji chi square didapatkan nilai  $p=0,019$  ( $p<0,05$ ) artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepatuhan terhadap pengetahuan.

Persentase tingkat kepatuhan lebih tinggi pada responden dengan tidak kesulitan dalam membayar iuran dibanding dengan kesulitan dalam membayar iuran. Hasil uji chi square didapatkan nilai  $p=0,000$  ( $p<0,05$ ) artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kesulitan dalam membayar iuran dengan kepatuhan.

Tingkat kepatuhan lebih tinggi pada responden dengan faktor ekonomi yang menghambat membayar iuran. Hasil uji chi square didapatkan nilai  $p=0,000$  ( $p<0,05$ ) yang artinya ada hubungan yang signifikan antara faktor yang menghambat membayar iuran dengan kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Penghasilan tetap dan akses ke fasilitas kesehatan tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Persentase tingkat kepatuhan lebih tinggi pada responden dengan tingkat penghasilan tidak tetap dibanding dengan responden tingkat penghasilan tetap. Hasil uji chi square didapatkan nilai  $p=0,187$  ( $p>0,05$ ) artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat penghasilan tetap dengan kepatuhan.

Persentase tingkat kepatuhan lebih tinggi pada responden dengan tingkat memiliki akses ke fasilitas kesehatan dibanding dengan responden tingkat tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Hasil uji chi square didapatkan nilai  $p=0,645$  ( $p>0,05$ ) artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat akses ke fasilitas kesehatan dengan kepatuhan.

## Pembahasan

### Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

Persentase tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS lebih tinggi pada kelompok peserta yang berpendidikan Perguruan Tinggi (50%) dibanding dengan tingkat pendidikan lainnya. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan ( $p = 0,000$ ).

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Wulandari et al., (2020) di Kota Solok, bahwa secara uji statistik didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan pendidikan dengan adanya kepatuhan para kelompok atau peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado. Kemudian, hubungan pendidikan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar JKN yang di mana masih terdapat peserta JKN mandiri yang tidak membayar iuran yang disebabkan adanya kurang pengetahuan terkait BPJS yang pada akhirnya para peserta/kelompok berpikir untuk tidak perlu membayar iuran.



Proses pembelajaran/pendidikan memberikan informasi yang dapat membentuk sebuah pengetahuan, sehingga seseorang berperilaku sesuai dengan keyakinan yang diterimanya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar pula kemampuan mengasimilasi, menerima dan mengolah informasi. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi maka dapat lebih mengetahui manfaat dan memahami mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan yang dapat dijamin dengan cara membayar iuran jaminan kesehatan sehingga tingkat kepatuhan individu dalam membayar program JKN akan semakin meningkat (Dewi et al., 2023).

Sebagian besar latar belakang pendidikan dari peserta mandiri Wilayah kerja Puskesmas Kutalimbaru adalah SMA dan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan tinggi ini membuat mereka mempunyai pengetahuan lebih luas serta mempunyai harapan lebih tinggi terhadap kualitas pelayanan. Ketika mereka memiliki persepsi pelayanan yang buruk, hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam pembayaran iuran JKN. Oleh karena itu dapat dipahami kenapa ada hubungan antara kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan lebih tinggi pada kelompok peserta dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi (Wulandari et al., 2020).

#### **Hubungan Tingkat Penghasilan Tetap dengan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Pembayaran BPJS Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru**

Persentase tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS Kesehatan lebih tinggi pada kelompok peserta dengan tingkat penghasilan tetap (50,0%) dibandingkan dengan kelompok peserta tingkat penghasilan tidak tetap (34,4%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara dua kelompok peserta ini dalam kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan ( $p = 0,187$ )

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Murniasih, 2022) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu ( $p \text{ value } 0,000 < 0,05$ )

#### **Hubungan Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan BPJS Kesehatan dengan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Pembayaran BPJS Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru**

Persentase tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS lebih tinggi pada kelompok peserta Puas (47,1%) dibanding dengan Kurang puas (23,3%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat Kepuasan Terhadap Layanan BPJS Kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan ( $p = 0,045$ ).

Penelitian ini sejalan dengan Lasut et al., (2021) yang menyatakan bahwa Kepuasan peserta berpengaruh positif terhadap tingkat kolektibilitas. Didukung juga oleh penelitian Wulandari et al., (2020) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara persepsi terhadap pelayanan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran program JKN ( $p \text{ value } 0,047 < 0,05$ ).

#### **Hubungan Akses ke Fasilitas Kesehatan dengan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Pembayaran BPJS Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru**

Persentase tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS lebih tinggi pada kelompok peserta memiliki akses ke fasilitas kesehatan (41,1%) dibanding dengan peserta yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan (20%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara dua kelompok peserta ini dalam kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan ( $p = 0,645$ ).

#### **Hubungan Kesulitan dalam Membayar Iuran dengan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Pembayaran BPJS Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru**

Persentase tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS lebih tinggi pada kelompok peserta tidak kesulitan (71,1%) dibanding dengan kesulitan (21%). Hasil uji statistik



menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat kesulitan dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan ( $p = 0,000$ ).

### **Hubungan Faktor yang Menghambat Membayar Iuran dengan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Pembayaran BPJS Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru**

Persentase tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS lebih tinggi pada kelompok peserta tidak ada faktor yang menghambat (71,1%) dibanding dengan tingkat faktor lainnya. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat Faktor yang Menghambat Membayar Iuran dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan ( $p = 0,000$ ).

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Faktor yang berhubungan signifikan dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru pada penelitian ini yaitu tingkat pendidikan, tingkat kepuasan terhadap layanan BPJS kesehatan, tingkat kesulitan dan tingkat faktor yang menghambat membayar iuran.

Faktor yang tidak memiliki hubungan yang signifikan adalah tingkat penghasilan tetap dan akses ke fasilitas kesehatan.

### **Saran**

BPJS Kesehatan diharapkan untuk memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan juga diharapkan memberikan informasi kepada peserta tentang cara menggunakan program BPJS Kesehatan, tata cara pembayaran, kepesertaan, dan sanksi yang diberikan apabila menunggak iuran. Dengan demikian, peserta akan lebih termotivasi untuk patuh dalam membayar dan menyukseskan program JKN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BPJS Kesehatan. (2016). *Laporan kepesertaan*.
- Dewi, K. R., Regita Miolda, P., Afifah, T. N., & Dwi Istanti, N. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Indonesia: Literature Review. *Jurnal Ventilator*, 1(2), 50–64. <https://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/Ventilator/article/view/301>
- Jamkesnews. (2019). *Tahun 2020, Kabupaten Deli Serdang Jamin Biaya Kesehatan 124.714 Warganya*. Jamkesnews. <https://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/nws/17727/20191227/tahun-2020-kabupaten-deli-serdang-jamin-biaya-kesehatan-124714-warganya>
- Lasut, R. F., Mandey, S. L., & Jan, A. H. (2021). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Besaran Premi Terhadap Tingkat Kolektibilitas dan Kepuasan Peserta sebagai Variabel Intervening pada BPJS Kesehatan Cabang Manado. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 633. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.633-646.2021>
- Miftahul Jannah, Zain, S. F., & Batara, A. S. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Mandiri Di Rsud Mamuju. *Public Health Journal*, 2(2), 1068–1077.
- Nasution, I. F. S., Kurniansyah, D., & Priyanti, E. (2022). Analisis pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). *Kinerja*, 18(4), 527–532. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9871>
- Rusydi; Arni Rizqiani, Nurgahayu, & Masri; Natasya Febrianti. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan Atp Dan Wtp Dalam Membayar Iuran Bpjs Kesehatan Mandiri. *Window Of Public Health Journal*, 3(4), 750–760.



- Thabrany, H. (2016). Jaminan kesehatan nasional. In *PT RajaGrafindo Persada (Kedua)*.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=890338#>
- Undang-undang (UU) No. 24.* (2011).
- Wulandari, A., Syah, N. A., & Ernawati, C. H. T. (2020). 1219-2642-1-Pb. *Jurnal Universitas Andalas*, 9(1), 7–17.
- Yunita, S. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Cipocok Jaya. *Journal of Baja Health Science*, 1(02), 191–201.  
<https://doi.org/10.47080/joubahs.v1i02.1502>